

# FAKTOR-FAKTOR YANG MENDASARI JEPANG Mencari Kursi TETAP DK-PBB

## 3.1 Faktor Politik

PBB merupakan satu-satunya organisasi universal yang bertujuan untuk mengayomi seluruh masyarakat internasional. Karena PBB dibentuk tidak hanya untuk menangani satu jenis persoalan saja, tetapi lebih luas yaitu baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan dan juga keamanan. Pada masa sekarang ini Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab yang penting dalam upaya memelihara keamanan dan perdamaian internasional. di bawah piagam PBB, Dewan Keamanan dapat bertindak atas nama negara anggota, dan negara ini berkewajiban menerima dan melaksanakan keputusan tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah organisasi internasional keanggotaan Dewan Keamanan dianggap istimewa.

Berbagai sudut pandang mengenai mengapa Jepang sangat menginginkan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB menuai banyak perdebatan, dalam *diplomatic blue book* Jepang (2005; 144) menguraikan dua keuntungan yang diperoleh Jepang jika Jepang mendapatkan kursi tetap di DK-PBB, yaitu pertama dilihat dari sudut pandang Jepang dan yang ke-dua sudut pandang internasional;

1. Dalam sudut pandang Jepang, keanggotaan permanen dari Dewan Keamanan akan memungkinkan Jepang untuk sangat dan secara terus-menerus dilibatkan dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian internasional, hal ini dapat meningkatkan kontribusi Jepang di dunia internasional, dan juga untuk merubah haluan politik regional Jepang sendiri.
2. Dalam sudut pandang internasional, keanggotaan permanen untuk Jepang berarti (1) adanya suatu peningkatan kontribusi mengingat Jepang sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia; (2) menambah suara untuk mewakili Asia yang selama ini hanya diwakili oleh China; (3) untuk mengupayakan aktivitas

Dewan Keamanan dilihat dari usaha diplomatik Jepang dalam ikut serta menjadi pendukung anti senjata nuklir dengan tidak menguasai senjata nuklir, ikut dalam perlucutan senjata, yang justru berbeda dengan anggota permanen sendiri.

Dengan begitu Jepang merasa memiliki kelebihan yang dapat ditawarkan untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan, selain hal itu untuk memenuhi ambisi internasionalnya, hal itu juga untuk memenuhi keinginan dari politik dalam negeri Jepang sendiri yang semenjak berakhirnya Perang Dunia II Jepang beserta rakyatnya berjanji untuk membangun Jepang berdasarkan pilar perdamaian.

Menurut Satoh Yukio yaitu seorang perwakilan Duta Besar Jepang untuk Belanda menyatakan bahwa ada dua alasan kenapa Jepang mencari kursi tetap di Dewan Keamanan PBB yaitu menurutnya,

*“First, to secure a greater say in international politics and, second, to transform the United Nations from a post-World War II organization to an organization befitting the twenty-first century.”*

Terjemahan: Pertama, untuk menjamin keamanan yang lebih besar dalam politik internasional dan, kedua, untuk mengubah bentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai suatu organisasi dari masa Perang Dunia II yang menyesuaikan diri dengan abad ke 21 saat ini.<sup>1</sup>

Keanggotaan permanen di dalam Dewan Keamanan membawa serta beberapa manfaat terukur. Anggota permanen tidak perlu berusaha untuk memperbaharui keanggotaan mereka di DK-PBB. Disamping itu dengan kekuatan veto yang mereka miliki, mereka dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang ingin dibuat dan menempati beberapa kunci puncak di dalam organisasi.<sup>2</sup>

Dengan demikian Jepang melihat adanya beberapa keuntungan strategis yang dapat dimiliki dengan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Keinginannya menjadi anggota DK-PBB juga dipengaruhi dengan adanya

<sup>1</sup> Satoh Yukio, *Japan Echo, Keep Pushing for Reform of the UN Security Council; Why Seat for Japan?*, December 2003, hal:37

<sup>2</sup> Yasuhiro Ueki, *op. cit*, hal. 365

beberapa faktor eksternal yang mendorong Jepang untuk memusatkan kebijakan politik luar negerinya di PBB, hal ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Adanya dua negara yang memiliki senjata Nuklir (RRC dan Korut)
2. Adanya dua negara yang memiliki potensi nuklir (Korsel dan Taiwan)
3. Adanya dua negara yang terpecah ideology (RRC dan Korea)
4. Adanya negara inti yang saling curiga (China, Korut, Korsel dan Jepang)
5. China dengan kekuatan hak vetonya di PBB.

Dengan begitu keinginan Jepang di DK-PBB juga tidak terlepas dari keinginan Jepang untuk menjadi kekuatan yang lebih penting di kawasan Asia pada khususnya dan dunia pada umumnya, yang sampai saat ini keinginannya menjadi anggota tetap DK-PBB masih terhalang dengan adanya keberatan dari China di PBB yang memiliki hak veto. Kekhawatiran Jepang atas negara sekawasannya yaitu Korea dan China mendorong Jepang untuk segera menunjukkan kekuatannya dan bagi Jepang keanggotaan tetap DK-PBB diharapkan mampu membendung adu kekuatan yang selama ini mengancam kedaulatan Jepang.

Jepang sudah lama memiliki keinginan untuk menjadi satu-satunya kekuatan di Asia, yaitu sejak semasa Perang Dunia I dan II berlangsung, dimana Jepang masih merumuskan kebijakan luar negerinya dengan menjadi negara ekspansionis "*In Nippon resides a destiny to become the light of greater East Asia and to become ultimately the Light of the World*". (Nobuya Bamba, 1978:378)

Hal ini juga dapat terlihat dari pernyataan yang pernah diungkapkan oleh Markas Besar Angkatan Laut Jepang berikut ini;

"....Kita perlu memanfaatkan tanah Selatan yang luas beserta sumber alamnya yang kaya yang dibiarkan begitu saja tidak dikembangkan. Lagi pula, membebaskan dan menolong bangsa-bangsa Selatan dari keadaan

---

<sup>3</sup> Abdul Irsan, *Jepang Secara Umum, Jepang sebagai kekuatan regional*, hal 9

prihatin ini merupakan tanggung jawab Jepang sebagai pemimpin Asia Timur Raya”.<sup>4</sup>

Bagi Jepang PBB juga merupakan alat legitimasi bagi identitas Jepang khususnya dalam pergaulan internasional. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Jepang telah bergeser dari suatu sumber hak kekuasaan di dalam masyarakat internasional dan merupakan badan dunia yang berfungsi untuk meningkatkan status internasionalnya menjadi suatu batu loncatan Jepang untuk membujuk para pelaku pemerintahan yang meragukan kebijakan politik luar negeri Jepang sampai mendesak pemerintahan luar negeri Jepang untuk mendapatkan posisi yang kuat di dalam organisasi internasional agar memperoleh peran dalam meningkatkan hubungan internasional Jepang.”<sup>5</sup>

Menghadapi kondisi-kondisi di atas, Jepang merasa perlu untuk merubah arah diplomasinya kearah yang lebih nyata khususnya dalam menjalani kebijakan luar negerinya melalui diplomasi multilateral. Jepang mulai menyadari bahwa tujuan dasar dari politik luar negerinya adalah dengan memperkuat perannya di PBB, dengan cara memberikan kontribusi baik ekonomi dan militer secara penuh dibawah kepentingan dan payung PBB.

MOFA sendiri menegaskan bahwa upaya pencapaian diplomasi multilateral yang dilakukan Jepang melalui kebijakan ekonomi dan militernya sebagai kebijakan luar negeri Jepang selama ini dilakukan untuk melindungi kepentingan dalam negeri Jepang. Jepang menjadikan ekonomi dan kontribusi PKO di PBB sebagai dua kunci kekuatan Jepang dalam menjalankan perannya di kancah internasional. Hal ini merupakan upaya Jepang untuk bisa masuk menjadi anggota tetap DK-PBB, sekaligus untuk membuktikan Jepang bukan lagi menjadi negara kelas dua tetapi “*First class citizen*” (*ittoo koku*).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Takashi Sankichi, *Umi Wo Yuku*, Tosoisha, Tokyo, 1943. hal. 249

<sup>5</sup> Yasuhiro Ueki, *op.cit*, hal. 367

<sup>6</sup> Glenn D Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes, and Hugo Dobson, *Japan's international Relation, 'Politics, Economics and Security'*, Routledge Taylor and Francis Group, New York and London, 2005 hal. 371

Pertimbangan pemerintah Jepang terhadap keinginan Jepang menjadi anggota tetap DK-PBB adalah sebagai berikut;<sup>7</sup>

1. *to promote Japanese representation befitting its financial contribution;*
2. *to procure the influential veto that automatically goes with a permanent UNSC seat;*
3. *to acquire information on various issues facing the UNSC.*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Naikafuku Daijin Kanboo Seifu Kohoshitsu* 2003<sup>8</sup>, mayoritas alasan opini masyarakat terhadap dukungannya untuk mendapatkan kursi tetap di DK-PBB adalah, agar Jepang dapat mengkontribusikan upaya perdamaian dunia. Kemudian sebanyak 50% pada tahun 2003 opini masyarakat juga menginginkan agar Jepang meningkatkan kontribusi militernya dalam upaya perdamaian di bawah bendera PBB dan hal ini untuk kepentingan Jepang sendiri.

Bagi Jepang keberhasilan negaranya menjadi kekuatan ekonomi dunia akan menjadi lebih kuat jika Jepang dapat memperkuat kemampuan politik dan militernya dengan menjadi pemain penting dunia, dan untuk ikut berperan dalam percaturan politik internasional, Jepang harus menjadi bagian dari kekuatan politik dunia bersama lima negara besar anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya.

### **3.2 Faktor Budaya**

Setelah kalah dalam Perang Dunia II, kemudian Jepang tampil sebagai negara dengan kekuatan ekonomi, Jepang mulai menunjukkan aktivitasnya di lingkungan internasional. Dalam perjalanannya hal ini mencerminkan perubahan kepentingan politik Jepang yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tentu saja disini ada faktor budaya, sejarah, sosial dan politik yang melatarbelakangi kekuatan bangsa Jepang untuk dapat bangkit kembali sebagai negara yang utuh,

<sup>7</sup> Glenn D Hook, *loc. cit.*

<sup>8</sup> Glenn D Hook, *Ibid*, hal. 372

dan juga memotivasi keinginan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Seperti yang dikatakan oleh Robert Jackson dan Sorensen dalam *Introduction to International Relations* edisi terjemahan (2005; 37), yang mengatakan bahwa, sistem negara merupakan lambang sejarah, yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Sistem dan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu negara dalam menjalankan hubungannya dengan negara lain tidak terlepas dari budaya dan sejarah yang dimiliki oleh negara tersebut. Kebudayaan menurut J.W.M. Bakker SJ.<sup>9</sup> Menjelaskan bahwa kebudayaan secara makro atau secara umum diartikan sebagai “segala hasil dan upaya budi daya manusia terhadap lingkungannya.”

Dalam mengamati perkembangan politik luar negeri Jepang maka tidak terlepas dari apa yang pernah dicatat Jepang dalam sejarahnya. Pola hubungan Jepang dengan negara-negara lain juga berevolusi sesuai perkembangan zaman. Kalau sampai saat ini tindakan politik Jepang dikenal sangat hati-hati, hal ini tidak terlepas dari faktor sejarah dan budaya, atau di PBB Jepang terlihat sangat berambisi itu juga tidak terlepas dari peranan budaya dan sejarah masa lalu yang dimiliki oleh bangsa Jepang. Sejarah merupakan sebuah tolak ukur yang dapat memaparkan gambaran kebudayaan dari perilaku anggota masyarakat suatu negara. Dalam mengamati latarbelakang budaya yang mendorong keinginan Jepang mendapatkan kursi tetap Dewan Keamanan PBB dapat dilihat dari berbagai segi budaya sebagai berikut ini:

### **3.2.1 Pertahanan Diri (*Survive*) dan Konsep Kewajiban (*Gimu*)**

Tindakan politik Jepang yang bersifat sangat hati-hati ini dikarenakan banyaknya ancaman yang dihadapi Jepang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Jepang. “*Risk minimalization*” yang dilakukan Jepang merupakan bentuk upaya Jepang dalam melindungi kepentingan negaranya dari setiap bentuk pertentangan yang muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Abdul Irsan (2007:50-52) menjelaskan bahwa akibat dari kondisi geografik Jepang sebagai

<sup>9</sup> Dr. Tulus Warsito, MSi, *Diplomasi Kebudayaan, “Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia”*, Ombak, Jogjakarta, 2007, hal. 3

negara kepulauan yang letaknya “terpencil” dari daratan benua Asia dan seringkali menghadapi bencana alam, dan hasil bumi yang terbatas, serta perasaan ancaman dari daratan Asia, telah menjadikan Jepang memiliki “*sense of survival*” yang tinggi. Konsep pertahanan yang kuat ini tidak hanya diberlakukan untuk membendung bentuk ancaman dari luar saja tetapi juga dari dalam negeri Jepang sendiri, hal ini dapat terlihat melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang Mutsu Munemitsu pada tahun 1958 yang menyatakan;

*“No matter how much we are opposed at home, we are determined to carry through unhesitatingly with resolve, believing as we do in our government's determination and our true national interest”*<sup>10</sup>

Ruth Benedict<sup>11</sup> juga menjelaskan bahwa pada awal pemerintahan Meiji para negarawan Jepang yang kembali pulang dari negara-negara Barat, menulis bahwa di semua negara sejarah itu diciptakan oleh adanya pertentangan antara penguasa dengan rakyatnya, tentu saja ini hal ini sangat tidak layak bagi semangat Jepang. Setelah kembali dari kunjungannya para negarawan ini membuat undang-undang dasar yang isinya “seorang penguasa itu haruslah keramat dan tidak dapat diganggu gugat dan ia harus menjadi lambang tertinggi dari kesatuan Jepang.” Oleh karena itu berdasarkan pandangan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang ini, ikatan kesetiaan antara rakyat terhadap pemerintahan Jepang sangat kuat.

Bentuk pertahanan diri (*survive*) yang sangat kuat dari bangsa Jepang ini tidak dapat dipisahkan dari faktor lingkungan. Menurut Watsuji Tetsuro<sup>12</sup> dalam bukunya *Fudo*, mengatakan bahwa lingkungan adalah suatu istilah yang mengacu pada pengertian tempat atau suatu wilayah dalam bentuk tanah, bumi dan seluruh isinya. Menurut Watsuji lingkungan ini senantiasa mempengaruhi, membentuk berbagai aspek kebudayaan, kehidupan sosial dan pertumbuhan kebudayaan itu sendiri. Sehingga setiap lingkungan akan menghasilkan suatu kebudayaan yang

<sup>10</sup> Micheal Blaker, *Japanese International Negotiating Style*, Columbia University Press, New York, 1977, hal. 17

<sup>11</sup> Ruth Benedict, *Pedang Samurai dan Bunga Seruni*, Sinar Harapan, Jakarta, 1982, hal. 132

<sup>12</sup> Watsuji Tetsuro, *Fudo* (translation) by Murakami Hyoe & Edward G. Seidensticker, *Guides to Japanese Culture; Climate*, Toppan Printing Co.ltd, Tokyo, Japan 1977, hal.41

berbeda karena menurut Watsuji, lingkungan mampu menggerakkan kebudayaan manusia. Nakano Takahasa dalam *Nihon no Shizen*<sup>13</sup> mengatakan bahwa, “alam mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap manusia, melalui apa yang dapat dilakukan manusia terhadap alam, cara manusia bertahan hidup dari alam tersebut, yang kemudian mempengaruhi emosi manusia, bahasa, dan seluruh aspek dalam kehidupan manusia yang membuktikan keberadaannya.

Timothy Hoye (1999:179), menjelaskan bahwa, dua aspek dari politik luar negeri Jepang melalui ekonomi dan perdagangan merupakan gambaran dari karakter geografi Jepang sebagai negara terpencil, negara kepulauan, dan hasil bumi yang sedikit, karakter geografi inilah yang membentuk jiwa “*hardworking*” bangsa Jepang.

Selain itu penyebab lainnya adalah adanya faktor sejarah antara negara sekawasan bekas jajahan Jepang selama Perang Dunia II yaitu China dan Korea, yang menyebabkan Jepang untuk selalu berusaha menunjukkan dan mempertahankan kekuatannya sebagai negara yang berjaya dari dulu sampai sekarang. Sehingga bagi Jepang keanggotaan tetap di Dewan Keamanan PBB merupakan sebuah tiket untuk melindungi negaranya dari ancaman luar.

Tingkat pertahanan diri yang kuat akibat dari letak geografis Jepang, menyebabkan Jepang memiliki tingkat pertahanan yang tinggi. Sebagai bangsa yang sadar akan hal ini Jepang telah melaluinya dengan berbagai cara. Pada masa kekuasaan Tokugawa Jepang menggunakan pertahanan diri dengan cara berusaha mempersatukan negaranya di bawah kekuasaan Kaisar dan berhasil membentuk seluruh masyarakat Jepang untuk memiliki nilai nasionalisme yang tinggi. Kemudian dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Kaisar tersebut, Jepang berhasil menutup negaranya dari pengaruh luar (*sakoku*) selama lebih dari 200 tahun.

Politik isolasi (*sakoku*) menurut Holsti (1992:86) “adalah sebuah cara yang dilakukan suatu negara untuk menutup diri dan berusaha untuk tidak menarik perhatian luar demi melindungi kepentingan negaranya.” Politik luar negeri dengan cara isolasi merupakan cara bertahan yang dilakukan Jepang untuk membentuk masyarakat Jepang agar memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap pemerintahan Jepang terutama Kaisar Jepang dan sebagai upaya pemerintah

---

<sup>13</sup> Nakano Takahasa, *Guides to Japanese Culture: Nihon no Shizen* (translation: Nature in Japan), Murakami Hyoe & Edward G by Seidensticker, Toppan Printing Co.ltd, Tokyo, Japan 1997, hal.3



Jepang dalam menjauhi pengaruh masyarakat Jepang dari dunia luar. Sehingga membentuk Jepang menjadi negara feodalisme yang kuat.

Pada masa Tokugawa Bentuk feodalisme yang berhasil diterapkan pemerintah Jepang ini dibuktikan dengan dibuatnya “falsafah nasional”<sup>14</sup> bangsa Jepang yang digunakan sebagai pegangan hidup yang dalam bahasa Jepangnya disebut “*kokutai no honggi*” (prinsip dasar negara), dimana prinsip tersebut menempatkan Kaisar sebagai penguasa negara yang merupakan keturunan langsung dari *Amaterasu (Dewa)*

Selain dari pada itu pada era Tokugawa ini, pemikiran-pemikiran konfusianisme disusun secara sistematis dan kemudian diadopsi menjadi ajaran dasar dalam menyelesaikan permasalahan politik dan juga sosial yang dihadapi bangsa Jepang. Murayama (1982: 108), mengatakan bahwa pada masa Tokugawa pemerintah Jepang memberlakukan doktrin keseimbangan yang bersumber dari ajaran konfusianisme, doktrin ini memberlakukan hal-hal yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara yang isinya antara lain:

1. Kepentingan pemerintah harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, sehingga rakyat harus bersedia untuk berkorban demi kepentingan nasional;
2. Pemerintah selalu berada pada posisi yang lebih tinggi dari pada kedudukan individu. Sehingga jika rakyat ingin maju harus patuh dan mengikuti peraturan pemerintah;
3. Pemerintah adalah abdi masyarakat. Apabila rakyat menghadapi kesulitan dan memerlukan bantuan pemerintah, agar disampaikan secara langsung, jelas dan santun;
4. Kebijakan pemerintah dibuat untuk menciptakan iklim pemerintahan yang harmonis. Untuk itu setiap individu masyarakat harus menyesuaikan dirinya dengan kebijakan pemerintah;
5. Doktrin kesetiaan tidak hanya dipatuhi dan berlaku bagi para samurai, pejabat dan karyawan pemerintah, tetapi juga bagi rakyat secara keseluruhan.

---

<sup>14</sup> Abdul Irsan, Budaya dan perilaku politik Jepang di Asia, 2007, hal. 47

Ajaran konfusianisme tersebut yang kemudian melandasi kesetiaan masyarakat Jepang terhadap pemerintah Jepang, dan doktrin ini telah berhasil membentuk karakter masyarakat Jepang dalam membangun pertahanan diri yang kuat dan juga sangat efektif untuk menjaga kelangsungan kekuasaan pemerintah Jepang. Doktrin tersebut juga dilengkapi dengan etika samurai (*bushido*) yang didalamnya terkandung nilai; kesetiaan, rela berkorban, disiplin, jujur dan pantang menyerah.

Memasuki masa Perang Dunia I pada tahun 1930, dalam melaksanakan politik luar negerinya Jepang melakukan politik luar negeri yang lebih agresif sebagai upaya mempertahankan kepentingan negaranya, yaitu dengan cara melakukan ekspansi ke China dan Korea, hal ini didasari oleh beberapa faktor kelemahan yang dimiliki Jepang seperti letak geografisnya dan sumber alamnya yang sedikit. Jepang melebarkan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan dagang, bahan mentah dan lain sebagainya. Berdasarkan peristiwa inilah hubungan Jepang, China dan Korea menegang sampai saat ini. Konflik-konflik yang terjadi diantara ke tiga negara tersebut merupakan ancaman bagi kepentingan Jepang dalam mempertahankan kepentingan negaranya.<sup>15</sup> Terlebih sampai saat ini China merupakan faktor penentu bisa tidaknya Jepang menjadi anggota tetap DK-PBB karena hak veto yang dimiliki China, namun keberhasilan Jepang menjadi negara pasifis ini sekali lagi merupakan salah satu bukti keberhasilan pemerintahan Jepang dalam menggerakkan rakyatnya untuk bersatu memperjuangkan kepentingan Jepang di atas segala-galanya.

Setelah kekalahannya pada Perang Dunia II, dengan keadaan dunia yang semakin global Jepang juga melakukan perubahan seiring perubahan yang terjadi. Pertahanan diri yang dilakukan Jepang dilakukan sesuai dengan semangat dunia yang ingin dipersatukan berdasarkan persamaan hak asasi. Kemunculan organisasi internasional PBB yang menjadi payung bagi ketuhan semua negara menjadi daya tarik bagi semua negara tidak terkecuali bagi Jepang. Terlebih bagi masyarakat Jepang yang sudah lelah dengan kebijakan perang yang dilakukan pemerintah Jepang semasa perang berlangsung. Trauma perang ini juga dilatarbelakangi oleh

---

<sup>15</sup> Timothy Hoye, *Japanese Politics Fixed and Floating Worlds*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1999.hal.189

kekalahannya Jepang dan pemboman yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki<sup>16</sup> disinilah Jepang mulai melakukan perubahan pada politik luar negerinya yang dimulai dengan perubahan pada sistem politik Jepang dimana kekuasaan Kaisar digantikan oleh demokrasi parlementer<sup>17</sup>, dan Kaisar hanya menjadi simbol pemersatu. Pada saat inilah secara perlahan Jepang mulai memainkan peranannya di dunia internasional melalui PBB untuk mencapai kepentingan negaranya.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam politik luar negeri Jepang merupakan gambaran budaya yang dilihat dari pergerakan waktu dan ruang yaitu sejarah, keterlibatannya di PBB, merupakan langkah baru untuk mencanangkan politik luar negeri yang baru bagi Jepang dalam melakukan hubungannya dengan negara-negara lain dan dalam prosesnya keterlibatan Jepang di PBB sampai keinginannya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB merupakan bentuk lain dari cara “*survive*” Jepang di dunia internasional.

Jepang menggunakan diplomasi “*pilar kembar*” untuk mencapai keinginannya di PBB, yaitu menyamakan posisinya dengan negara-negara demokratis maju dan mendekatkan hubungannya dengan negara-negara Asia. Dalam hal ini Jepang merasa berkewajiban untuk ikut mengupayakan perdamaian dunia terkait dengan prinsip “*cinta damai*” yang dianut Jepang setelah Perang Dunia II, dan Jepang juga merasa berkewajiban untuk membayar kesalahan-kesalahannya di masa lampau.

Menurut Micheal Blaker<sup>18</sup> Jepang memiliki dua karakter dalam upaya penyelesaian konflik yang juga mempengaruhi karakter diplomasi Jepang dari dahulu sampai sekarang yaitu *Harmonious Cooperation* dan *the warrior Ethic*. Blaker juga memaparkan latar belakang budaya yang mempengaruhi gaya-gaya diplomasi Jepang dalam dunia internasional adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Mengenai pemboman di Nagasaki dan Hiroshima lihat, Dale M. Hellegers, *Japanese We The People, “world War II and The Origins of The Japanese Constitution.”*, Stanford university Press, California, 2001, hal.405

<sup>17</sup> Demokrasi parlementer yaitu sebuah sistem kedaulatan yang berpindah ke tangan rakyat yang sepenuhnya dikendalikan oleh partai politik, Dr. Mochtar Mas’oed, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Bulaksumur, Jogjakarta, 2006, hal.200-216

<sup>18</sup> Micheal Blaker, *op. cit*, hal 4

Pengaruh budaya domestik yaitu terdiri dari:

1. *Harmonies Cooperation*. Yaitu adanya sebuah sistem harmoni dengan konsep “*gimu*” yaitu kewajiban yang dilakukan karena adanya “*on*” yang diterima oleh individu atau masyarakat.
2. *The warrior ethic*. Yaitu adanya etika militer Jepang atau “*bushido*”; yang membangun prinsip kesetiaan yang berdasarkan pada sistem feodalisme.

Dalam situasi negara yang semakin berkembang dan terus berubah Jepang juga dihadapkan dengan kondisi baru yang dituntut untuk dapat selalu menyesuaikan negaranya dengan keadaan sekarang. Kemampuan Jepang dalam memperbaiki perekonomiannya yang kalah akibat perang menjadikan Jepang tampil sebagai negara ekonomi kuat yang tergabung dalam “*rich club country*”. Untuk mengaplikasikan bentuk kewajiban (*gimu*) Jepang yang sesuai dengan zaman dan juga karakter dari kebijakan politik luar negerinya saat ini, Jepang berusaha menerjemahkan bentuk kewajibannya dengan cara yang berbeda dengan apa yang pernah dilakukan Jepang ketika masa perang dunia berlangsung. Kalau pada masa terjadinya perang dunia II Jepang mengartikan bentuk kewajibannya dengan cara menolong bangsa Asia dengan cara ekspansi, maka saat ini Jepang mengartikan bentuk kewajibannya dengan cara berusaha menjadi pemain penting dunia. Cara tersebut dilakukan Jepang dengan berupaya untuk memainkan peranan yang lebih luas dalam pergaulan internasional, khususnya dalam organisasi internasional PBB. Konsep kewajiban ini merupakan bentuk budaya *gimu* Jepang yaitu adanya rasa bertanggung jawab yang disertai dengan rasa kewajiban.

Ruth Benedict<sup>19</sup>, menjelaskan bahwa Jepang memiliki ikatan yang kuat dalam melakukan kewajiban-kewajibannya baik secara individu terhadap keluarganya maupun masyarakat terhadap negaranya. Perasaan-perasaan kewajiban ini tidak terlepas dari perasaan kewajiban untuk membayar hutang-hutang, atau membayar tanggung jawab atas segala tindakan-tindakan yang telah

---

<sup>19</sup> Ruth Benedict, *op. cit*, hal. 121-125

diperbuatnya. Bennedict menjelaskan konsep kewajiban ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. *Gimu*: yaitu suatu kewajiban membayar kembali secara maksimal tanpa batas waktu, dalam hal ini yaitu;
  - a) *Chu*: yaitu kewajiban terhadap Kaisar, hukum, negara, dan yang lebih luas terhadap seluruh dunia.
  - b) *Ko*: yaitu kewajiban terhadap orang tua dan nenek moyang
  - c) *Nimmu*: yaitu kewajiban terhadap pekerjaan seseorang.
  
2. *Giri*: yaitu kewajiban yang wajib di bayar dalam jumlah yang sama dan ada batas waktu pembayarannya;
  - a) *Giri* terhadap dunia
  - b) *Giri* terhadap Nama seseorang, yaitu kewajiban untuk “membersihkan” reputasinya dari penghinaan atau tuduhan kegagalan, dan kewajiban membalas dendam.

Bentuk kewajiban-kewajiban tersebut dilakukan Jepang karena adanya “*on*” yang diterima sebagai sebuah tanggung jawab. Dalam hal ini, khususnya terkait dengan alasan serta upaya Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jepang merasa bahwa kewajibannya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang diupayakan melalui berbagai kontribusi ekonomi dan juga militer merupakan sebuah tanggung Jepang sebagai negara yang memiliki kemajuan ekonomi terbesar kedua di dunia. Jepang merasa harus membayar semua kesalahan-kesalahan masa lalu Jepang yang terjadi pada saat perang berlangsung. Kewajiban ini juga karena negara-negara yang menerima bantuan Jepang khususnya Asia merupakan faktor penting dalam upaya membantu upaya mencapai kepentingan dalam negeri Jepang. Sehingga Jepang menjadikan hal tersebut sebagai “*on*” yang diterima Jepang.

Berdasarkan konsep yang dipaparkan di atas bila dicermati dalam menjalankan kebijakan luar negerinya Jepang berusaha untuk selalu menyesuaikan kebijakannya dengan tanggung jawab dan kewajiban yang dimilikinya. Pada saat perang berlangsung misalnya, Jepang mengartikan kewajibannya dengan cara menjadi ekspansionis. Hal ini terlihat pada pernyataan Markas Besar Angkatan Laut Jepang sebelum perang berlangsung yang mengungkapkan bahwa, “.....membebaskan dan menolong bangsa-bangsa Selatan dari keadaan prihatin ini merupakan tanggung jawab Jepang sebagai pemimpin Asia Timur Raya”.<sup>20</sup> Jadi tindakan Jepang yang bersifat agresi itu selain bertujuan untuk melindungi kepentingan Jepang (*survive*), tetapi juga didorong dengan adanya konsep kewajiban (*gimu*) yang diyakini oleh bangsa Jepang.

Pada saat ini sebagai negara ekonomi kuat dan dengan perubahan zaman yang telah berkembang pesat, Jepang memberikan bentuk kewajibannya dengan cara memberikan kontribusinya secara penuh dalam upaya pemeliharaan dunia melalui PBB. Hal ini dibuktikan Jepang dengan menjadi pemberi anggaran terbesar ke-dua setelah AS, kemudian melalui ODA, Jepang memberikan kontribusinya dalam membantu negara-negara berkembang khususnya di Asia. Dan melalui *Self Defense Force* Jepang juga ikut berperan dalam menjaga stabilitas dunia melalui PKO-PBB. Dimana semuanya itu juga tidak terlepas dari upaya Jepang untuk melindungi kepentingan negaranya.

Dengan semua kontribusi yang diberikan Jepang melalui ekonomi, *Official Development Agency* dan juga *Peace Keeping Operation* melalui *Self Defense Force*, maka sebuah posisi yang sesuai dalam PBB menjadi tujuan utama Jepang. Khususnya dalam keanggotaan tetap DK-PBB, bagi Jepang kewajiban-kewajiban yang telah dibayar oleh Jepang baik dari kesalahan-kesalahannya pada masa Perang Dunia II dulu telah cukup membentuk Jepang baru yang sesuai dengan harapan masyarakat Jepang sekarang.

---

<sup>20</sup> Takashi Sankichi, *loc. cit.*

Seperti yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Yoshida Shigeru yang mengungkapkan alasan masuknya Jepang di PBB yaitu,<sup>21</sup>

“bahwa alasan masuknya Jepang di PBB merupakan sebuah bentuk kewajiban dan tanggung jawab (*gimu*) Jepang dalam upaya ikut serta memelihara perdamaian dunia, dan dengan banyaknya kemajuan yang telah diraih Jepang baik dalam ekonomi, teknologi dan lainnya, maka wajib bagi Jepang untuk melibatkan dirinya dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan isu-isu internasional. Ikut berpartisipasi dalam kerjasama internasional dengan sendirinya akan memberikan konsekuensi tersendiri bagi Jepang untuk terlibat dalam badan keamanan internasional, dan ini tentunya untuk mencegah serangan militer atau ancaman dalam bentuk apapun terhadap Jepang (*survive*).”

Dalam ungkapan tersebut terlihat bahwa Jepang harus melakukan kewajiban (*gimu*) sebagai anggota negara dunia yang merdeka untuk ikut bertanggung jawab memelihara perdamaian dunia dan disisi lain juga untuk memperoleh keamanan negaranya dari ancaman dunia luar (*survive*). Hal ini juga dapat dilihat melalui pernyataan yang terdapat dalam buku laporan ODA Jepang 2002<sup>22</sup> yang mengatakan, “*The objectives of Japan’s ODA are to contribute to the peace and development of the international community, and thereby to help ensure Japan’s own security and prosperity.*”

Kontribusi-kontribusi Jepang melalui ODA merupakan bentuk penerapan budaya *gimu* Jepang terhadap dunia yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kemampuan yang dimiliki Jepang. Hal ini dikarenakan bahwa ODA yang merupakan bentuk diplomasi konsolidasi damai Jepang di dunia internasional merupakan sebuah kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan dunia saat ini, dan cara damai ini merupakan hal yang dianggap paling cocok bagi Jepang untuk menghapus kesalahan-kesalahan dari masa lalunya dan untuk

---

<sup>21</sup> Japanese Association of International Law, *op. cit*, hal. 46-46

<sup>22</sup> ODA White Paper 2002, Tokyo: Ministry of Foreign Affairs, 2004

membalas negara-negara yang telah bekerjasama dengan Jepang yang akhirnya dapat melindungi kepentingan dalam negeri Jepang sendiri.

Dalam piagam ODA, yang menjelaskan mengenai filosofi dasar pembentukan ODA di dalamnya menggambarkan mengenai adanya kewajiban Jepang sebagai negara yang cinta damai dan juga sekaligus sebagai upaya melindungi kepentingan dalam negeri Jepang berikut adalah isi dari piagam ODA;<sup>23</sup>

*“Japan aspires for world peace. Actively promoting the aforementioned efforts with ODA, and manifesting this posture both at home and abroad is the most suitable policy for gaining sympathy and support from the international community for Japan's position. Therefore, Japan's ODA will continue to play an important role in the years to come.” “Japan will proactively contribute to the stability and development of developing countries through its ODA. This correlates closely with assuring Japan's security and prosperity and promoting the welfare of its people.”*

Isi piagam ODA di atas dapat diartikan bahwa, Kontribusi-kontribusi yang dilakukan Jepang di PBB melalui ODA menggambarkan bentuk kewajiban Jepang sebagai negara yang cinta damai (*aspires for world peace*) yang juga merupakan anggota dari masyarakat internasional yang berusaha mewujudkan tercapainya perdamaian dunia (*obligation*), dan juga sebagai upaya untuk memperoleh dukungan dan simpati untuk memperkuat posisi Jepang (*for gaining sympathy and support for Japan's position*) dalam melindungi kepentingan dan keamanan negaranya (*assuring Japan's security and prosperity*).

Kinichi Komano<sup>24</sup> seorang Duta Besar Jepang menekankan bahwa, “pendekatan-pendekatan yang dilakukan Jepang di PBB melalui upaya keamanan manusia menyertakan dua unsur yaitu untuk “perlindungan dan “kekuatan” Jepang.” Selanjutnya Direktur Umum JDA (*Japan Defense Agency*) untuk periode

<sup>23</sup>: <http://www.mofa.go.jp/policy/oda/reform/revision0307.html>, “*Japan's Official Development Charter*”, hal.3, 02 oktober 2007

<sup>24</sup> Japan's Ministry of Foreign Affairs, [http://www.mofa.go.jp/policy/human\\_secu/state0606.html](http://www.mofa.go.jp/policy/human_secu/state0606.html). 02 oktober 2007



tahun 1996 yaitu Fukushiro Nukaga<sup>25</sup> juga mengatakan bahwa, “ikut berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional melalui SDF adalah hal yang sangat vital untuk mengisi tanggung jawab Jepang sebagai anggota internasional dan dalam upaya mewujudkan diplomasi damai Jepang.” Dari pernyataan-pernyataan tersebut terlihat bahwa kebijakan politik luar negeri Jepang yang disesuaikan dengan kepentingan dalam negeri Jepang merupakan bentuk upaya Jepang mempertahankan kepentingan dan keutuhan negaranya dengan cara menjalankan tugasnya sebagai negara sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dunia.

Pada tahun 2005 Direktur Umum *Japan's Defense Agency* yaitu Yoshinori Ono<sup>26</sup> kembali menegaskan bahwa “upaya perdamaian internasional yang dicanangkan melalui PBB akan memberikan keamanan bagi Jepang (*survive*) dan juga untuk meningkatkan imej Jepang.”

Konsep pertahanan diri dan kewajiban merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Jepang dalam upayanya untuk memperoleh dan melindungi kepentingan negaranya. Hal ini juga mencerminkan adanya budaya harmoni yaitu keseimbangan antara kepentingan untuk melindungi negaranya yang disesuaikan dengan usaha-usaha yang seimbang dan maksimal. Budaya keseimbangan ini juga semakin lengkap dengan adanya budaya Jepang yang meyakini bahwa setiap negara “layak menempati tempat yang sesuai”, artinya setelah Jepang berusaha menjalankan kebijakan luar negerinya yang disesuaikan untuk melindungi kepentingan negaranya (*survive*) dengan cara memberikan kontribusi-kontribusi yang nyata sebagai bentuk tanggung jawab Jepang terhadap dunia, maka kontribusi-kontribusi yang nyata tersebut tentunya akan menunjukkan kekuatan dan keistimewaan yang dimiliki oleh negara yang mampu memberikan kontribusi terbanyak terhadap dunia, dan hal itu tentunya menjadi tolak ukur dalam menentukan posisinya di lingkungan internasional khususnya dalam organisasi PBB.

---

<sup>25</sup> Takao Takahara, “Japan in Trevor Findlay”, *Challenges for the New Peacekeepers*, Oxford: SIPRI, 1996, hal.52

<sup>26</sup> Julie Gilson, Julie Gilson, *Pacific Affairs: Vol. 80, No.1-Spring 2007*, “*Building Peace or Following the Leader? Japan's Peace Consolidation Diplomacy*”, University of British Columbia, 2007, hal.27-39, hal. 43

### 3.2.2 Menempati Tempat yang Sesuai

Sejarah telah banyak menguraikan ragam kebudayaan bangsa Jepang yang tercermin melalui budaya sosial dan politik Jepang dalam menjalankan hubungannya dengan dunia internasional. Dalam usaha untuk memahami berbagai latarbelakang budaya yang mengatur setiap gerak hubungan Jepang dengan negara-negara di dunia, sangat dipengaruhi dengan adanya keyakinan bangsa Jepang yang memahami adanya prinsip persamaan dalam hak dan derajat. Setelah berbagai kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Jepang sebagai anggota masyarakat dunia terpenuhi, Jepang meyakini bahwa setiap usaha dan pencapaian yang telah dilakukan oleh setiap negara tersebut harus mendapatkan tempatnya yang sesuai.

Pola pemikiran mengenai “tempat yang sesuai” ini dapat terlihat melalui cara Jepang dalam melakukan kontak hubungan dengan orang lain, dimana hal tersebut tidak hanya mengatur mengenai perbedaan kelas saja, tetapi ada kewajiban dan hak yang sepadan di dalamnya. Tingkah laku yang diatur secara hirarki ini dapat terlihat dalam pola-pola bahasa Jepang yang dibedakan penggunaannya sesuai dengan siapa ia berbicara, kemudian bahasa-bahasa non-verbal melalui cara membungkuk yang dilakukan sebagai tanda penghormatan.<sup>27</sup>

Dalam hubungan antar negara Jepang juga sangat memperhatikan hak-hak yang patut diterima secara layak dan sesuai untuk setiap negara, seperti dalam penjelasan kaisar dalam penandatanganan Pakta pada tahun 1940 antara pemerintah-pemerintah Jepang, Jerman dan Italia, memandang bahwa sebagai prasyarat untuk terciptanya perdamaian abadi, bahwa semua negara di dunia masing-masing harus diberi tempat yang sesuai, berikut adalah bunyi dari pernyataan Kaisar Jepang;<sup>28</sup>

“Kami sangat mengharapkan bahwa gangguan-gangguan akan berhenti dan perdamaian ditegakkan kembali secepat mungkin...karenanya, kami sangat berterima kasih bahwa fakta ini tercapai antara ketiga negara. Tugas untuk memungkinkan masing-masing bangsa menempati tempatnya yang

---

<sup>27</sup> Ruth Benedict, *op. cit*, hal.55

<sup>28</sup> Ruth Benedict, *ibid*, hal.51

sesuai dan untuk memungkinkan semua orang hidup damai dan aman adalah tugas yang terbesar. Hal ini belum ada duanya dalam sejarah. Tujuan ini masih sangat jauh.”

Pada hari yang sama dengan terjadinya serangan atas Pearl Harbor, Duta-Duta Jepang juga memberikan pernyataan yang tidak jauh berbeda mengenai prinsip persamaan hak dan tempat yang sesuai. Pernyataan yang diungkapkan oleh Duta-Duta Jepang ini merupakan bentuk tanggapan pemerintah Jepang terhadap prinsip-prinsip persamaan yang telah diungkapkan oleh pemerintah Amerika. Dalam pernyataannya para Duta Besar Jepang tersebut menyatakan bahwa;<sup>29</sup>

“kebijaksanaan pemerintah Jepang yang tidak dapat diubah adalah untuk memungkinkan setiap negara menempati tempatnya yang sesuai di dunia..., pemerintah Jepang tidak dapat mentolerir berlangsungnya keadaan sekarang ini karena bertentangan langsung dengan kebijaksanaan dasar pemerintah Jepang untuk memungkinkan setiap negara menikmati tempatnya yang sesuai di dunia.”

Perubahan dunia telah membawa perubahan dalam kebijakan politik luar negeri Jepang. Kalau pada masa Perang Dunia berlangsung kebijakan Jepang yang bersifat agresi mendorong Jepang untuk menempati tempat yang sesuai dalam arti sebagai kekuatan di dunia dengan cara ekspansi, hal ini tentunya berbeda dengan sekarang. Keinginan Jepang untuk menempati tempat yang sesuai tentunya tidak terlepas dari tujuan politik luar negeri Jepang yang bertujuan untuk menjaga kepentingan dalam negeri Jepang. Hubungan antar negara yang berkembang dari bilateral sampai multilateral telah menghadirkan tantangan baru bagi Jepang untuk dapat *survive* dalam mewujudkan kepentingan negaranya.

Kemunculan organisasi PBB yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dunia telah membawa banyak negara termasuk Jepang untuk ikut berpartisipasi memainkan peranannya sesuai tanggung jawab yang dipikul setiap negara sebagai anggota masyarakat dunia. Prinsip perdamaian, cinta damai, dan

---

<sup>29</sup> Ruth Benedict, *loc cit.*

adanya persamaan hak atas semua negara yang diusung oleh PBB, menjadi tolak ukur bagi setiap negara dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Jepang sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia II dengan cepat merubah haluan politiknya sesuai dengan keadaan zaman. Bagi Jepang jika kepentingan negara Jepang dapat terwujud dengan cara mendukung adanya konsep negara-negara yang dipersatukan melalui PBB, maka Jepang berkomitmen untuk menjalankan kewajibannya di sana.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Katsuo Okazaki<sup>30</sup> ketika memberikan pidatonya pada sidang Diet, sehubungan dengan keinginan Jepang menjadi anggota PBB menurutnya sebagai negara yang cinta damai Jepang berkeinginan dan mampu untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Piagam PBB.

Kontribusi-kontribusi yang telah diberikan Jepang secara terus menerus telah membuktikan pencapaian yang maksimal untuk Jepang, dan bagi Jepang sendiri kontribusi-kontribusi yang telah banyak diberikan Jepang terhadap dunia khususnya melalui PBB tersebut telah mendorong Jepang untuk mendapatkan tempat yang sesuai, Menteri Luar Negeri Jepang Kawaguchi, dalam pernyataannya di sidang umum PBB yang ke 59<sup>th</sup> pada tahun 2004, menyatakan menurutnya;

“PBB harus mempertimbangkan kemungkinan Jepang untuk dapat menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB hal ini dilihat dari banyaknya kontribusi yang telah dilakukan Jepang dalam memberikan bantuan di bidang ekonomi kepada seluruh komunitas dunia dan sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia.”(BlueBook: 2005: 144)

Selanjutnya MOFA atau *Ministry of Foreign Affairs*<sup>31</sup> Jepang juga mengungkapkan harapannya bahwa agar perluasan pendukung yang dilakukan oleh Jepang secara terus-menerus ini akan secepatnya diartikan ke dalam

---

<sup>30</sup> Japanese Association of International Law, *op. cit*, hal.95

<sup>31</sup> Amy E Searight, *US-Japan Relations in a Changing World*, International Organizations, Brookings, Institution Press, Washington, D.C., 2002. hal.84

penerimaan yang luas oleh negara anggota PBB lainnya dengan menyadari bahwa Jepang layak memperoleh suatu tempat yang permanen di DK-PBB. Disini terlihat bahwa Jepang sangat mempercayai bahwa keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh tiap-tiap negara di dunia apakah itu kekuatan ekonomi, militer, sumber daya, jumlah penduduk dan sumber alam harusnya mampu menempatkan tempat yang sesuai di dunia.

Perdana Menteri Jepang Hosokawa Morihiro<sup>32</sup> dalam pidatonya di sidang umum PBB pada tahun 1993, yang kemudian menyusul satu tahun kemudian pernyataan dari Wakil Perdana Menteri Jepang Kono Yohei yang juga merupakan Menteri Luar Negeri Jepang, kedua-duanya sama-sama menyatakan bahwa sebagai negara ekonomi kuat dan dengan banyaknya kontribusi nyata yang telah diberikan Jepang di PBB tentunya sudah pasti Jepang disahkan oleh banyak negara untuk menjalankan kewajibannya dalam upaya mempersatukan dan memperbaiki tatanan dunia, dan Jepang layak untuk memegang tanggung jawabnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Sebagai negara yang mendasarkan kebijakan politiknya pada kebijakan ekonomi, Jepang telah berhasil mensejajarkan negaranya dengan negara-negara industri maju lainnya. Hubungan Jepang dengan negara-negara maju tersebut yaitu seperti Amerika dan negara-negara Eropa Barat telah memperkuat perannya di PBB. Untuk itu Jepang merasa bahwa negaranya yang merupakan bagian dari negara-negara industri maju sudah selayaknya mendapat pengakuan dunia bahwa Jepang layak menempati tempat yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh negaranya.

Dalam Piagam ODA mengenai pilosofi dasar dari ODA disebutkan bahwa;

*“Basic philosopy of ODA, It is an important mission for Japan, as a peace-loving nation, to play a role commensurate with its position in the world to maintain world peace and ensure global prosperity.”*<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Fujita Hiroshi, Japan Quarterly, Asahi Shimbun, *UN Reform and Japan's Permanent Security Council Seat* October-December, 1995, vol.XL II, no. 4

<sup>33</sup> <http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1999/ref1.html>. "Japan's Official Development Charter. Para.3, 13 Desember 2007

Terjemahan filosofi dasar ODA, adalah suatu misi penting untuk Jepang, sebagai bangsa pencinta damai, untuk memainkan suatu peranan yang setaraf dengan posisinya di dunia dan untuk memelihara perdamaian dunia dan memastikan kemakmuran global.)

Jepang merasa bahwa keinginan Jepang untuk menempati tempat yang sesuai bukan merupakan permintaan yang berlebihan. Hal ini ditunjukkan Jepang dengan memperkuat peranannya di PBB. Jepang telah mengalami evolusi pada kebijakan luar negerinya sebagai upayanya untuk memperkuat peranannya di PBB. Berbagai pendekatan diplomasi banyak diupayakan Jepang untuk mencapai keinginan Jepang di PBB. Takeshi Inoguchi (*Japan's International Relationship*), memaparkan mengenai perkembangan politik luar negeri Jepang dari *free riding* sampai *supporter*, di mana evolusi itu semakin mencerminkan kepentingan yang ingin dicapai Jepang di PBB khususnya di Dewan Keamanan PBB.

Faktor-faktor politik dan budaya yang mendasari keinginan Jepang untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, juga menggambarkan karakter diplomasi yang dilakukan Jepang dalam berinteraksi dengan dunia. Dalam upayanya untuk melindungi kepentingan dalam negerinya, Jepang menjadikan PBB sebagai kunci *survival* Jepang. Kontribusi-kontribusi yang dilakukan Jepang di PBB, merupakan bentuk kewajiban yang seharusnya juga meletakkan hak yang sesuai. Untuk itu dalam memperjuangkan keinginannya di PBB Jepang melakukan berbagai upaya dan pendekatan diplomasi. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Jepang untuk mencapai keinginannya di PBB akan dijelaskan pada bab berikut ini.